

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan dimulai dengan membahas tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam negosiasi kekuasaan, terutama dalam interaksi pembelajaran di perguruan tinggi. Pateda (2011) menegaskan bahwa bahasa menjadi sarana yang sangat penting untuk menjembatani hubungan individu dengan dunia luar, memungkinkan ekspresi diri sekaligus pengaruh terhadap orang lain. Dalam kerangka ini, Pierre Bourdieu (1991) melihat bahasa bukan semata alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium tindakan dan kekuasaan yang mampu mendominasi dan mengontrol. Hal tersebut terlihat jelas dalam berbagai ranah, termasuk politik dan pendidikan, di mana bahasa menjadi sarana persuasi, dominasi, maupun resistensi (Al-Shboul dkk., 2024; Agho, 2025; Rachmawati dkk., 2022).

Dalam konteks pembelajaran di kelas, dosen sering kali memegang posisi dominan melalui penggunaan bahasa yang merefleksikan kekuasaan, sehingga membatasi ruang partisipasi mahasiswa (Alkhouri dkk., 2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dosen cenderung mengadopsi gaya pengajaran yang otoritatif dan satu arah, yang secara signifikan mengurangi kesempatan mahasiswa untuk terlibat dalam interaksi dialogis. Praktik diskursif yang bersifat non-interaktif, ditambah dengan gaya penyajian yang minim responsivitas terhadap audiens, menjadi faktor penghambat partisipasi aktif mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari kelompok minoritas. Konsekuensinya, mahasiswa menjadi kurang terlibat dalam proses interaksi kelas (Clark, 2010).

Van Dijk (2008) berpendapat bahwa relasi kekuasaan terwujud melalui kontrol atas bahasa dan wacana. Dalam pandangannya, bahasa bukan sekadar alat

komunikasi yang netral, melainkan merupakan instrumen ideologis yang digunakan untuk menciptakan, mempertahankan, dan melegitimasi dominasi sosial. Pemikiran ini menjadi salah satu landasan konseptual dalam penelitian ini.

Sejalan dengan kerangka tersebut, kebijakan pendidikan tinggi Indonesia melalui Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 menekankan pentingnya pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, dengan peran dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, ruang kelas tidak lagi dipahami semata sebagai tempat transfer pengetahuan, melainkan sebagai arena sosial di mana kekuasaan diproduksi, dinegosiasikan, dan dipraktikkan secara aktif oleh seluruh partisipan. Relasi antara dosen dan mahasiswa pun bersifat dinamis, tidak bersifat hierarkis secara tetap, melainkan terus-menerus terbentuk dan berubah melalui praktik interaksi verbal maupun nonverbal. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang relasional dan kontekstual, yang senantiasa dinegosiasikan melalui komunikasi sehari-hari (Foucault, 1977; Wrong, 1995; Taylor dkk., 2018).

Foucault (1977) mengatakan kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu tertentu, melainkan hadir dalam relasi sosial dan bekerja melalui mekanisme diskursif. Kekuasaan tidak bersifat represif semata, tetapi juga produktif, karena membentuk perilaku, wacana, dan bahkan identitas subjek. Dalam ruang kelas, kekuasaan tidak hanya datang dari dosen sebagai otoritas formal, tetapi juga diproduksi dan didistribusikan melalui interaksi kelas dengan mahasiswa.

Sementara itu, Wrong (1995) menekankan pentingnya melihat kekuasaan sebagai proses yang tidak sepenuhnya deterministik. Ia menggarisbawahi bahwa setiap bentuk kekuasaan selalu membuka kemungkinan bagi resistensi dari pihak yang dikenai kekuasaan. Perspektif ini memungkinkan kita melihat mahasiswa bukan sebagai subjek pasif, tetapi sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk merespons, menegosiasikan, bahkan menggugat struktur kuasa yang berlaku di kelas. Taylor dkk., (2018) lebih menekankan pada aspek sosiokultural dan interaksional dari proses belajar. Mereka berpendapat bahwa relasi kuasa dalam pembelajaran terbentuk melalui praktik diskursif sehari-hari, termasuk bahasa,

gestur, serta pola partisipasi dalam interaksi kelas. Identitas dan posisi sosial peserta didik tidak ditentukan secara tetap, melainkan dikonstruksi melalui keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial yang bermakna.

Dalam penelitian ini, negosiasi kekuasaan dipahami sebagai suatu proses yang bersifat dinamis dan kontekstual, di mana individu yang terlibat dalam interaksi sosial, khususnya dalam ruang kelas, secara aktif berupaya mengatur, mempertahankan, atau mengubah posisi sosial mereka melalui penggunaan bahasa dan tindakan komunikatif. Relasi kuasa dalam pembelajaran tidak bersifat tetap atau satu arah, melainkan terbentuk dan dinegosiasikan melalui praktik diskursif yang berlangsung dalam interaksi verbal antara dosen dan mahasiswa. Melalui proses ini, kedua pihak saling membentuk serta menyesuaikan peran, otoritas, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar (Foucault, 1977; van Dijk, 1992). Konsep ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa kekuasaan dalam pendidikan tidak hanya hadir dalam bentuk struktural, melainkan juga dalam praktik interaksi kelas sehari-hari. Dengan menelaah bagaimana kekuasaan dinegosiasikan di dalam kelas, penelitian ini berusaha memahami lebih dalam dinamika interaksi yang membentuk proses belajar itu sendiri.

Dalam memahami dinamika interaksi dan negosiasi kekuasaan di ruang kelas, penting untuk mempertimbangkan peran kognisi sosial, yaitu proses mental yang memungkinkan individu untuk mengamati, menafsirkan, dan memahami perilaku, niat, serta posisi sosial pihak lain dalam interaksi. Menurut van Dijk (1993), kognisi sosial berperan sebagai penghubung antara struktur sosial dan struktur wacana, yang memediasi bagaimana individu memproduksi dan menafsirkan ujaran dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks pembelajaran, hal ini memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk menyesuaikan strategi interaktif mereka berdasarkan pemahaman terhadap peran sosial, norma yang berlaku, serta ekspektasi lawan bicara (Mercer & Howe, 2012).

Selain itu, konteks sosial juga menjadi dimensi penting dalam membingkai interaksi kelas. Konteks ini mencakup struktur institusional, norma akademik, hierarki sosial, serta nilai-nilai budaya yang secara kolektif memengaruhi praktik

komunikasi dan distribusi kekuasaan dalam proses pembelajaran. Secara operasional, konteks sosial dapat dipahami sebagai kondisi atau struktur sosial yang relevan dengan suatu interaksi, yang mencakup faktor-faktor seperti latar belakang institusional, situasi dan peran sosial, tujuan, dan norma. Mengacu pada van Dijk (2012), konteks sosial merupakan representasi mental terhadap aspek-aspek lingkungan sosial yang dianggap relevan oleh peserta komunikasi dalam memahami dan menghasilkan wacana (hlm. 274). Dengan demikian, konteks sosial tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga dibentuk oleh interpretasi subjektif individu, yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana otoritas, partisipasi, dan makna akademik dinegosiasikan dalam ruang kelas.

Wodak (1996) menekankan bahwa pemaknaan atas ujaran hanya dapat dipahami secara utuh jika mempertimbangkan konteks sosial dan ideologis yang melingkupinya. Dalam kerangka ini, ruang kelas dipahami sebagai lingkungan sosial yang kompleks, di mana interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung dalam batasan maupun peluang yang dibentuk oleh struktur sosial yang lebih luas (Taylor dkk., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Brooks (2016) mengkaji peran sosial dan pergeseran kekuasaan yang tertanam dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa di lingkungan kelas. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa kekuasaan dalam kelas kontemporer cenderung terpusat pada dosen. Meskipun mahasiswa tampak berada dalam posisi yang relatif tidak berdaya, mereka mampu memanfaatkan momen-momen diskursif yang bersifat ritualistik untuk mengambil alih sebagian kendali percakapan dan menyuarakan bentuk-bentuk resistensi halus. Dalam konteks ini, mahasiswa mengadopsi peran sosial tertentu dan menggunakan bahasa sebagai strategi untuk secara implisit mengklaim otoritas. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian materi, tetapi juga sebagai medium utama dalam membangun, menegosiasikan, bahkan menantang struktur kuasa yang ada di ruang kelas.

Studi lain yang dilakukan oleh Alotaibi (2019) melihat relasi antara pilihan bahasa dan praktik kekuasaan di kelas bahasa Inggris. Temuan hasil studi

menunjukkan dosen dan mahasiswa menggunakan kekuasaan dalam praktik verbal dan nonverbal di kelas. Dosen mendisiplinkan mahasiswa dalam pengawasan dan mengontrol dalam pemilihan bahasa. Sementara mahasiswa memberikan perlawanan terhadap kekuasaan yang diberikan oleh dosen. Para mahasiswa mengekspresikan secara verbal perlawanan terhadap dosen dengan menggunakan bahasa pertama dalam menegosiasikan kekuasaan di dalam kelas dan secara nonverbal mahasiswa menunjukkan perlawanan dengan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Inggris ketika dosen melarang menggunakan bahasa pertama.

Mei-Yee Wong (2016) menggambarkan faktor-faktor yang membentuk hubungan kekuasaan antara guru dengan siswa. Hasil penelitian menunjukkan ada enam faktor yang memengaruhi hubungan relasi kekuasaan antara guru dan siswa dalam ruang lingkup pendidikan diantaranya budaya tradisional Tiongkok yang menghormati guru dan otoritas, pengajaran yang berorientasi pada ujian, budaya keagamaan yang mendorong ketidakseimbangan kekuasaan guru dan siswa dimana mendorong kekuasaan guru yang lebih besar, reformasi kurikulum, pendidikan nilai-nilai dan beberapa budaya sekolah memfasilitasi hubungan kekuasaan guru dan siswa yang relatif seimbang.

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menyoroiti dominasi dosen sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat tetap dan kurang menelaah dinamika negosiasi kekuasaan secara mendalam. Selain itu, integrasi konsep analisis bentuk kekuasaan, kognisi sosial dan konteks sosial masih jarang dikaji secara simultan dalam konteks kelas perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan meneliti proses negosiasi kekuasaan antara dosen dan mahasiswa pada kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Universitas Negeri Jakarta, sebuah mata kuliah yang secara khusus mendorong diskusi terbuka dan refleksi kritis terhadap isu sosial-politik dan nilai kebangsaan sehingga menyediakan ruang yang ideal untuk mengamati praktik negosiasi kekuasaan secara nyata (Wong, 2016; Van Lier, 2000). Selain itu, penelitian ini juga mengungkap tingkat relasi kekuasaan yang menjadi landasan utama yang

membentuk dinamika interaksi antara dosen dan mahasiswa yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Kerangka teoritis utama dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh van Dijk (1992), yang membedakan antara dua tingkatan utama dalam struktur wacana, yaitu struktur mikro dan struktur makro. Struktur mikro mencakup elemen-elemen linguistik yang tampak dalam permukaan teks, seperti bentuk tindak tutur, pilihan kata, serta urutan ujaran dalam interaksi. Sementara itu, struktur makro merujuk pada organisasi global dari wacana, termasuk topik utama, skema tematik, serta pola-pola argumentatif yang mendasari keseluruhan interaksi komunikatif (van Dijk, 1992, hlm. 232).

Untuk menganalisis data pada level mikro, penelitian ini mengacu pada teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle (1969), terutama dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi yang muncul dalam percakapan antara dosen dan mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas bentuk kekuasaan yang termanifestasi melalui strategi komunikasi secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap praktik kuasa yang dibentuk dan dinegosiasikan dalam interaksi kelas.

Sementara itu, untuk memahami dimensi kognisi sosial dan konteks sosial yang melingkupi wacana, penelitian ini juga mengacu pada teori van Dijk (2002, 2012). Kognisi sosial berperan sebagai penghubung antara struktur diskursif dan struktur sosial, sedangkan konteks sosial mencakup norma, nilai, serta struktur institusional yang membingkai interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini yaitu struktur mikro, struktur makro, serta dimensi sosial dan kognitif, kerangka teoritis ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara utuh dan komprehensif.

Hasil penelitian mengungkap bahwa negosiasi kekuasaan dipengaruhi oleh bentuk relasi kekuasaan, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk dominasi dalam relasi ini bersifat fleksibel dan dapat berubah tergantung pada konteks interaksi. Terdapat tiga bentuk relasi kekuasaan yang teridentifikasi dalam tuturan antara dosen dan mahasiswa, yaitu: relasi

kekuasaan yang didominasi oleh dosen, relasi kekuasaan yang setara, dan relasi kekuasaan yang bersifat hierarkis namun tetap dinamis. Di sisi lain, kognisi sosial terbukti memainkan peran penting dalam membentuk strategi interaksi, pemilihan tindak tutur, serta sikap interaksional baik dari dosen maupun mahasiswa. Dimensi ini memperlihatkan bahwa praktik kekuasaan tidak hanya bersumber dari struktur sosial, tetapi juga dari interpretasi dan pemaknaan kognitif terhadap situasi interaksi.

Dari perspektif linguistik, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan pendekatan Analisis Wacana Kritis (van Dijk, 1992, 2002, 2012) dengan teori tindak tutur (Searle, 1969) dalam menganalisis negosiasi kekuasaan, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam interaksi kelas. Pendekatan ini menawarkan model analisis wacana yang lebih holistik dan interdisipliner, yang mampu menjelaskan hubungan antara struktur bahasa, representasi mental, dan dinamika sosial secara simultan. Secara metodologis, penelitian ini memperkuat penggunaan analisis struktur mikro dan makro wacana dalam mengungkap praktik kekuasaan yang tersembunyi melalui strategi interaksi kelas.

Secara aplikatif, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan linguistik pendidikan, khususnya dalam merancang praktik pembelajaran yang lebih dialogis, setara, dan partisipatif. Selain itu, studi ini membuka ruang eksplorasi baru dalam kajian bahasa dan kekuasaan, dengan menelaah secara empirik bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, menegosiasikan, dan mempertahankan relasi sosial dan ideologis dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan pendekatan lintas bidang yang menggabungkan analisis wacana kritis dan pragmatik, penelitian ini memperkaya subdisiplin linguistik, serta memperluas cakupan kajian linguistik dalam menjawab isu-isu kontemporer pendidikan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuasaan dinegosiasikan antara dosen dan mahasiswa dalam interaksi kelas?
2. Bagaimana kognisi sosial antara dosen dan mahasiswa direalisasikan dalam interaksi kelas?
3. Bagaimana interaksi kelas antara dosen dan mahasiswa dipengaruhi oleh konteks sosial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengungkap bagaimana kekuasaan dinegosiasikan antara dosen dan mahasiswa dalam interaksi kelas.
2. Untuk mengungkap bagaimana kognisi sosial antara dosen dan mahasiswa direalisasikan dalam interaksi kelas.
3. Untuk mengungkap bagaimana interaksi kelas antara dosen dan mahasiswa dipengaruhi oleh konteks sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam kajian linguistik, khususnya yang berkaitan dengan analisis wacana kritis. Temuan-temuan dalam penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori-teori yang membahas penggunaan kekuasaan dalam wacana interaksi, serta memperluas konteks penerapannya. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori analisis wacana kritis dari van Dijk (1992) dan teori pragmatik tindak tutur dari Searle (1969). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua teori tersebut mampu mengungkap dinamika relasi kuasa dalam interaksi kelas secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini mengindikasikan bahwa kedua teori tersebut

efektif diterapkan dalam ranah pendidikan secara simultan, khususnya dalam wacana interaksi antara dosen dan mahasiswa di kelas.

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini memberikan wawasan kepada para dosen mengenai strategi penggunaan kekuasaan dalam proses pembelajaran. Dengan memahami cara memanfaatkan kekuasaan secara tepat dan proporsional, dosen dapat menciptakan suasana kelas yang lebih partisipatif dan efektif. Pemanfaatan kekuasaan yang positif dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan memberikan tanggapan, sehingga interaksi dalam pembelajaran menjadi lebih dinamis dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis yang dibingkai dengan metode analitik. Pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai kekuasaan (Asher & Simpson, 1994, hlm. 940). Fokus penelitian ini adalah tuturan dosen dan mahasiswa dalam interaksi kelas pada mata kuliah Pendidikan Moral dan Pancasila di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta. Penelitian dilakukan selama semester genap tahun akademik 2023/2024.

Sumber utama data dalam penelitian ini adalah seorang dosen laki-laki berusia 36 tahun yang mengampu mata kuliah tersebut, serta 40 orang mahasiswa semester 5 yang mengikuti perkuliahan. Data diperoleh melalui teknik purposive sampling, dengan satuan analisis berupa proposisi dari tuturan lisan yang muncul selama proses pembelajaran. Penelitian ini tidak mencakup komunikasi non-verbal maupun komunikasi tertulis yang terjadi di luar interaksi kelas secara langsung.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori wacana kritis dari van Dijk (1992, 2002, 2012) dan teori tindak tutur dari Searle (1969). Analisis struktur makro dan mikro menggunakan kerangka dari van Dijk (1992). Struktur mikro dianalisis menggunakan teori Searle untuk mengidentifikasi bentuk dan fungsi ilokusi dalam tuturan. Sementara itu, aspek kognisi sosial dianalisis berdasarkan tiga skema: pengetahuan, sikap, dan ideologi (van Dijk, 2012, hlm.

114–115). Untuk konteks sosial, analisis dilakukan dengan merujuk pada tiga elemen utama: situasi sosial, tindakan, dan pelaku (van Dijk, 2002, hlm. 116).

Batasan data dalam penelitian ini meliputi interaksi verbal yang terjadi secara langsung antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Data hanya dikumpulkan dari satu kelas pada satu mata kuliah, dan tidak mencakup bentuk komunikasi non-verbal, komunikasi tertulis, maupun interaksi di luar konteks pembelajaran formal.

1.6 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat tiga konsep utama yang menjadi landasan analisis, yaitu relasi kekuasaan, kognisi sosial, dan konteks sosial. Ketiga konsep ini dioperasionalkan secara spesifik untuk mengkaji praktik negosiasi kekuasaan yang terjadi dalam interaksi kelas antara dosen dan mahasiswa melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis.

1. Relasi Kekuasaan

Relasi kekuasaan dalam konteks interaksi kelas dioperasionalkan sebagai bentuk hubungan yang tidak seimbang antara dosen dan mahasiswa, yang terekspresikan melalui pilihan bahasa, strategi persuasi, tindakan tutur, serta pengelolaan giliran berbicara di dalam kelas. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak dipahami sebagai entitas tetap atau mutlak, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, dipertahankan, atau bahkan dipertanyakan melalui praktik diskursif. Interaksi verbal antara dosen dan mahasiswa menjadi arena tempat kekuasaan direproduksi maupun dipertarungkan melalui wacana. Sebagaimana ditegaskan oleh van Dijk (1996), kekuasaan dalam wacana terletak pada kontrol atas teks dan percakapan, di mana aktor dominan (seperti dosen) memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi struktur diskursif dan arah komunikasi.

2. Kognisi Sosial

Kognisi sosial dioperasionalkan sebagai sistem representasi mental bersama yang terbentuk dari pengalaman sosial, norma, dan ideologi yang dimiliki oleh para peserta interaksi. Kognisi ini memainkan peran penting dalam cara dosen dan mahasiswa memahami situasi interaksional, membentuk ekspektasi, serta

memaknai ujaran pihak lain. Van Dijk (2012) menjelaskan bahwa kognisi sosial merupakan jembatan antara struktur sosial dan praktik diskursif, karena aktor sosial membentuk model mental terhadap peristiwa komunikatif berdasarkan pengetahuan sosial dan ideologi yang mereka miliki. Dalam konteks kelas, model mental tersebut berperan dalam menentukan cara penutur memosisikan dirinya maupun lawan bicaranya, serta dalam menafsirkan makna tuturan dalam kerangka relasi kekuasaan.

3. Konteks Sosial

Konteks sosial dioperasionalkan sebagai latar sosial dan institusional yang memengaruhi dan dibentuk oleh interaksi antara dosen dan mahasiswa. Konteks ini mencakup faktor-faktor seperti struktur hierarki akademik, norma komunikasi, tujuan institusional, dan ekspektasi peran. Menurut van Dijk (2002), konteks bukanlah latar statis, melainkan struktur sosial dinamis yang direpresentasikan secara subjektif oleh para aktor dalam bentuk *context models*, yaitu representasi kognitif tentang siapa yang terlibat, dalam situasi apa, dan dengan tujuan apa. Oleh karena itu, dalam interaksi kelas, baik dosen maupun mahasiswa secara aktif membentuk dan menyesuaikan perilaku komunikatif mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap konteks sosial yang berlaku.

Dengan mengoperasionalkan ketiga konsep ini, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kekuasaan dinegosiasikan dalam praktik wacana kelas, serta bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa mencerminkan sekaligus membentuk struktur sosial melalui mekanisme kognitif dan representasi kontekstual yang kompleks.